

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM MENCEGAH DEGRADASI MORAL TERHADAP ISU SARA DAN HOAX

Dewi Oktaviani Hidayat¹, Inggi Eltariant¹, Oktralika¹, Rahmat Kevin Priyatna¹, Sindi Agustina Fernanda¹

¹Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Lampung
priyatnakevin10@gmail.com

Abstrak

Pancasila adalah suatu dasar negara dan ideologi negara Indonesia sejak 18 Agustus 1945. Mulai sejak itu kita menjadi warga negara yang dimana segala penyelenggaraan negara didasarkan atas Pancasila. Dalam perumusan Pancasila terjadi berbagai perdebatan yang akhirnya diputuskan suatu dasar negara yaitu Pancasila. Dengan itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus menghargai segala jasa para pahlawan yang telah membentuk suatu falsafah yang dapat menyatukan Indonesia. Indonesia adalah negara yang berbentuk kepulauan yang terdiri dari suku, agama, ras, adat istiadat yang beragam. Hal ini membuat berbagai tantangan muncul didalam negara ini. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi juga merupakan bentuk berkembangnya peradaban dunia ini. Setiap perkembangan yang ada menimbulkan suatu dampak positif dan negatif. Degradasi moral bangsa Indonesia adalah dampak dari berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Banyaknya pengaruh-pengaruh dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini salah satunya yaitu beredarnya isu SARA dan *hoax*. Dengan adanya kedua hal tersebut tentu dapat membuat persatuan yang dibentuk dari awal dengan adanya Pancasila akan memudar dan perlahan jauh dari kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kata Kunci : *Nilai-nilai Pancasila, Degradasi Moral, Isu SARA, dan Hoax.*

I. PENGANTAR

Seperti yang dikatakan oleh Achmad Fedyani Syaifuddin (2006) bahwa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang majemuk. Mengapa dikatakan majemuk? karena Indonesia sangat banyak sekali menyimpan keragaman suku, budaya, agama dan bahasa yang mengikat dalam diri bangsa Indonesia. Kemajemukan bangsa Indonesia terbagi menjadi dua yaitu kemajemukan vertikal dan kemajemukan horisontal. Kemajemukan vertikal merupakan perbedaan tingkat pendidikan, kekayaan dan kedudukan Islam, sedangkan kemajemukan horisontal merupakan perbedaan-perbedaan suku, agama, dan kedaerahan yang ada di Indonesia. Dengan sejarahnya, Indonesia banyak sekali konflik-konflik isu SARA yang

terjadi saat ini. Selain itu, Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar ideologi yang dijadikan pedoman bagi bangsa Indonesia agar warga Indonesia menjadi warga yang berkarakter, memiliki moral yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dan menjadi bangsa yang cinta terhadap tanah air. Nilai-nilai Pancasila inilah yang akan mengatur kehidupan warganya agar berfikir secara rasional dan bertindak sesuai ideologi untuk menghadapi isu SARA serta berita-berita *hoax* yang semakin beredar saat ini.

Pada era globalisasi saat ini banyak sekali pengaruh negatif terhadap negara Indonesia, salah satunya yaitu lunturnya nilai-nilai luhur. Ancaman yang muncul dari era globalisasi saat ini terhadap nilai-nilai yang tercantum dalam ideologi Pancasila tidak bisa



dianggap kecil lagi, karena pengaruh yang masuk dalam ideologi Pancasila perlahan-lahan tanpa kita sadari mengakibatkan degradasi moral. Oleh karena itu, diperlukan adanya penanaman nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan kekeluargaan serta nilai keadilan.

II. KAJIAN TEORI

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengandung nilai-nilai bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Van Langenberg (1999), bahwa salah satu nilai yang terkandung dalam Pancasila yaitu nilai moral yang menjadi dasar dalam setiap tingkahl aku (Wahyudi, 2006). Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara (1962), bahwa Pancasila mengandung nilai kebudayaan yang dijadikan sebagai dasar dalam suatu proses pendidikan yang multicultural (Rachmah, 2013).

Menurut Kriyantono (2012), isu adalah berbagai perkembangan didalam arena public kemudian berlanjut dan berdampak lebih luas kepada masyarakat. Isu juga merupakan titik awal munculnya konflik, jika tidak mendapat pengolahan dengan baik dan tidak sesuai dengan harapan public seperti kebijakan, operasional, jumlah produk atau komitmen organisasi. Sedangkan menurut De Vito (2011) dan Will Kymlicha (2002), bahwa penggunaan bahasa di media social dapat menimbulkan isu seperti di media massa pada umumnya, setiap orang bebas untuk berekspresi di media social tan pagate keepera taueitor

seperti media massa. Apabila halt ersebut tidak didasarkan pada solidaritas maka akan menimbulkan konflik yang memicu SARA (Evelina, 2015; Lestari, 2015).

Terjadinya konflik SARA diakibatkan adanya degradasi moral masyarakat. Menurut Hurlock (1993), degradasi moral merupakan suatu keadaan dimana telah terjadi kemerosotan moral yang bermakna bahwa maupun kelompok telah tidak menaati peraturan serta tata cara yang berlaku di masyarakat. Sedangkan menurut Lickona bahwa degradasi moral disebabkan oleh interaksi sosial yang memberikan pengaruh buruk terhadap pola pikir dan kepribadian (Cahyo, 2017).

III. PEMBAHASAN

Pengertian Degradasi Moral

Negara Indonesia adalah suatu negara kepulauan yang memiliki banyak sekali keanekaragaman mulai dari suku, agama, ras, bahasa, budaya dan adat istiadat yang menjadi salah satu negara multikultural. Di era globalisasi sekarang ini, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat pesat, dalam perkembangannya ini dapat memberikan dampak positif dan dampak negatif. Salah satu dampak negatif nya yaitu degradasi moral, berita *hoax*, dan timbulnya beberapa konflik-konflik isu SARA. Degradasi moral yaitu merupakan suatu merosotnya atau lunturnya suatu budi pekerti, perilaku seseorang atau kelompok. Moral merupakan ajaran baik buruknya tingkah laku, akhlak, dan budi pekerti, yang dapat ditarik dari suatu cerita. Moral sebagai bentuk keyakinan yang menjadi dasar tindakan atau gagasan yang sesuai dengan

peraturan yang disepakati secara pasif oleh masyarakat. Moral berperan penting dalam bergaul, menentukan individu untuk bisa diterima dimasyarakat yang terwujud dalam konsep-konsep seperti: sikap jujur, patuh, empati, dan sebagainya. Pembahasan tentang moral tidak bisa terlepas dari sikap, sebagai perbuatan yang didasari norma-norma yang merupakan ketentuan yang mengikat sekelompok warga dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat 5 norma yang berlaku yaitu: agama, kesusilaan, kesopanan, kebiasaan, dan hukum. Norma agama didasarkan pada ajaran akidah spiritual, norma kesusilaan berdasar pada akhlak, norma kesopanan berpangkal dari aturan di masyarakat, norma kebiasaan didasarkan pada tindakan berulang dalam hal yang sama, sedangkan norma hukum didasarkan pada aturan yang resmi dan diakui negara. Dari penjelasan tentang norma tersebut, menunjukkan bahwa moral berhubungan dengan norma, norma berhubungan dengan nilai, sehingga nilai, norma, dan moral saling berhubungan. (Mody, 2018; Toto, 2016; Endang, 2010; Yuniscadan Mona, 2016; Surur, 2010).

Faktor Penyebab Timbulnya Isu SARA dan Hoax

Webster's World Dictionary of American Language, kata 'toleransi' secara etimologis berasal dari Bahasa Latin, *tolerare* yang berarti menahan, menanggung, membetahkan, membiarkan, dan tabah. Dalam bahasa Inggris, kata itu berubah menjadi *tolerance* yang berarti sikap membiarkan,

mengakui, dan menghormati keyakinan orang lain tanpa memerlukan persetujuan. Sedangkan toleransi artinya, sifat atau sikap toleranterdapat dua kelompok yang berbeda kebudayaan itu saling berhubungan dengan penuh. Oleh karena itu, apabila bangsa ini tidak berpendirian pada nilai toleransi maka akan menimbulkan suatu dampak yaitu adanya *Primordialisme*. (Hutabarat dan Panjaitan, 2016; Maryati dan Priatna, 2017). *Primordialisme* adalah sebuah pandangan atau paham yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adatistiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di dalam lingkungan pertamanya. Di satu sisi, sikap primordial memiliki fungsi untuk melestarikan budaya kelompoknya. Namun, di sisi lain sikap ini dapat membuat individu atau kelompok memiliki sikap *etnosentrisme*, yaitu suatu sikap yang menganggap budayanya lebih baik dari budaya orang lain. Mereka akan selalu memandang budaya orang lain tidak ada apa-apanya dibandingkan budayanya. Hal ini terjadi karena nilai-nilai yang telah tersosialisasi sejak kecil sudah menjadi nilai yang sangat melekat dalam diri dan sangatlah sulit untuk merubahnya dan cenderung dipertahankan bila nilai itu sangat menguntungkan bagi dirinya. Terdapat dua jenis *etnosentris* yaitu: *Etnosentris fleksibel* yakni suatu sikap yang cenderung menilai tingkah laku orang lain tidak hanya berdasarkan sudut pandang budaya sendiri tetapi juga sudut pandang budaya lain. Sedangkan *Etnosentris infleksibel* yakni suatu sikap yang cenderung bersifat subjektif dalam memandang budaya atau tingkah laku

orang lain. Kedua jenis *etnosentrisme* ini lebih mengarah pada lahirnya isu SARA. Isu SARA dalam kehidupan masyarakat yang multireligius, menempati tingkatan politik yang menyediakan isu agama dan etnik pada tempat yang lebih sempit, tetapi jelas dalam sistem sosiokultural, aktualisasi agama ini sering terkait dengan konflik-konflik isu SARA. (Supriadi, 2015).

Kasus Isu SARA dan Hoax

Beberapa tahun terakhir, peristiwa konflik yang terjadi di masyarakat sering terjadi. Peristiwa konflik yang terjadi akan selalu ada media yang meliput, karena isu ini memang "seksi" bagi insan pers. Peristiwa yang mengandung konflik adalah salah satu peristiwa yang dianggap layak untuk dijadikan sebuah berita. Konflik dianggap memiliki nilai berita yang termasuk tinggi karena biasanya menimbulkan kerugian atau korban (Sentosa, 2017). Sanksi untuk pelaku yang menuliskan dalam media sosial nya berisi ujaran kebencian terhadap suatu kaum/agama dan bertujuan menghasut masyarakat ikut menyudutkan suatu kaum akan dikenakan pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. pertanggung jawaban pelaku sebagai pelaku penistaan SARA di jejaring sosial dapat dikatakan sebagai Penjahat. (Luwol, 2018). ibaratkan *hoax* sebagai sebuah racun informasi yang efeknya lebih berbahaya daripada racun pada makanan atau minuman. Karena racun pada makanan atau minuman dapat segera diobati karena orang yang keracunan sadar bahwa dirinya terkena racun, sedangkan orang yang keracunan informasi tidak akan pernah tahu bahwa

dirinya terkena racun, hanya orang-orang disekitarnya yang mungkin tahu tetapi mereka tidak akan dapat berbuat banyak untuk menolong orang yang sudah terkena racun informasi tersebut. (Septanto, 2018)

Kemudian selain isu SARA, ada juga sesuatu yang memicu degradasi moral yaitu tentang beredarnya berita-berita palsu atau *hoax*. *Hoax* memberikan pengaruh kepada setiap orang yang membaca berita *hoax* agar orang tersebut percaya dengan berita tersebut seolah benar adanya. Seseorang yang menuliskan, menyampaikan, bahkan sampai menggunakan suatu informasi untuk membuat masyarakat yakin terhadap informasi itu, padahal informasi itu tidaklah benar disebut sebagai penyebar berita palsu atau *hoax*. Banyak sekali berita-berita *hoax* yang beredar di sosial media saat ini contohnya seperti informasi *recruitment* besar-besaran tenaga kerja asal Cina. Hal itu dikaitkan dengan pencalonan Basuki Tjahaja Purnama atau sering dikenal dengan sebutan Ahok yang beretnis Cina. Masuknya tenaga kerja tersebut diduga untuk mengambil alih lapangan kerja di Indonesia dan menimbulkan persepsi sentiment anti Cina. Apabila hal tersebut semakin digencarkan di media sosial, maka akan menyebabkan banyak perilaku yang memicu adanya degradasi moral masyarakat Indonesia. Dengan ini dapat dikatakan bahwa antara isu SARA dan *hoax* memiliki hubungan satu sama lain. Sebab, suatu isu SARA dapat dilatarbelakangi oleh adanya informasi yang tidak valid atau biasa disebut dengan *hoax*. (Kurniawan, 2017; Levina, 2014 ; Rasywir & Purwarianti, 2015;



Prayitno, 2017; Ferdian, 2016; Oktavianti & Riris, 2017)

Beberapa hal diatas adalah contoh dari adanya degradasi moral yang tentunya perlu diatasi dan segera ditindakan. Dan juga kita perlu menelaah lebih dalam mengenai isu SARA dan berita *hoax* yang beredar. Hal tersebut dapat kita atasi dengan pengamalan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Pengimplementasian Nilai-Nilai Pancasila untuk mencegah Isu SARA dan Hoax

Nilai Pancasila di sila pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa) yaitu mengutamakan aspek *spiritualisme* tetapi bukan aspek *materialisme*, yang berarti bahwa setiap warga negara Indonesia wajib memiliki agama dan lebih mengedepankan sikap religius karena hidup ini bukan hanya mencari kekayaan dan kesenangan tapi ada tanggung jawab terhadap Tuhan, segala sesuatu yang dilakukan hendaknya berpikir dahulu apakah sesuai dengan kaidah agama. Memperkuat keimanan salah satu contoh upaya membentengi diri dari tindakan tercela seperti menyebarkan berita yang belum pasti kebenarannya/*hoax*. (Latif, 2011)

Sila kedua (kemanusiaan yang adil dan beradab) yaitu: mengandung tentang pemberdayaan manusia agar tidak semena-mena terhadap alam dan makhluk hidup lainnya. Dalam hal ini berarti setiap manusia harus memiliki keadaban dalam setiap bertingkah laku didalam kehidupan sosial yang didalamnya terdapat manusia dan makhluk hidup lain. Nilai kemanusiaan

didalam sila ini menunjukkan kesadaran sikap penghargaan atas nilai-nilai kemanusiaan tanpa memandang suku, agama, ras. Nilai ini diterapkan dalam bentuk meningkatkan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi. (Fuad, 2012)

Sila ketiga (Persatuan Indonesia) yaitu mengandung makna persatuan yang bertujuan mempersatukan suku, agama, ras, dan adat istiadat yang beragam di Indonesia. Yang dimaksud dalam sila ini yaitu kita sebagai bangsa yang majemuk harus mengedepankan rasa toleransi yang didasarkan persatuan/ wujud Bhinneka Tunggal Ika.

Sila keempat (Kerakyatan Yang Dipimpin oleh hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ perwakilan) yaitu mengandung makna untuk mencegah adanya kesalah pahaman dan kecenderungan individualis yang dapat memicu adanya konflik isu SARA dan *hoax*. Dalam sila ini kita dapat membina diri kita dan orang lain dengan bergotong- royong agar mampu mewujudkan suatu ketentraman dan kesejahteraan bangsa. Selain itu Indonesia menganut sistem demokrasi yang berarti proses musyawarah yang demokrasi tidak sekedar mengutamakan suarah rakyat tetapi juga mengedepankan aturan hukum. Jadi segala sesuatu yang dianggap dapat merugikan orang lain akan diproses pihak hukum (Maftuh, 2008).

Sila kelima yaitu: mengandung makna tentang mengupayakan suatu kebijakan yang dapat dinikmati dan dihargai oleh semua masyarakat Indonesia. Dalam hal ini diupayakan agar setiap manusia mampu

membuat keputusan yang seadil-adilnya bagi setiap warga negara tanpa adanya diskriminasi (Dumanhuri, 2016; Juliswara, 2017; Lonto, 2015).

Pada zaman reformasi saat ini pengimplementasian pancasila sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya di lembaga pendidikan dalam membentuk pola pikir dan meningkatkan pengetahuan siswa dalam memahami makna ideology Pancasila serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai acuan tingkah laku sehari-hari (Faradila, HolilullohdanAdha, 2014) karena di dalam pancasila terkandung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Selain itu, kini zaman globalisasi begitu cepat menjangkiti negara-negara di seluruh dunia termasuk Indonesia. Gelombang demokratisasi, hak asasi manusia, *neo-liberalisme*, serta *neo-konservatisme* dan *globalisme* bahkan telah memasuki cara pandang dan cara berpikir masyarakat Indonesia. Hal demikian bisa meminggirkan pancasila dan dapat menghadirkan sistem nilai dan *idealisme* baru yang bertentangan dengan kepribadian bangsa. Implementasi pancasila dalam kehidupam bermasyarakat pada hakikatnya merupakan suatu realisasi praksis untuk mencapai tujuan bangsa. Antara lain yaitu dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan dan kemananan (POLEKSOSBUDHANKAM) serta aspek Hak Asasi Manusia (HAM).

IV. KESIMPULAN

Degradasi moral adalah suatu keadaan dimana kurang sadarnya individu terhadap etika sehingga

mengakibatkan setiap tingkah lakunya tidak dilandaskan pada etika. Seperti halnya isu SARA dan *hoax* adalah contoh yang membuktikan suatu degradasi moral. Maraknya isu SARA dan berita palsu atau *hoax* akan mengakibatkan dampak yang sangat miris bahkan sampai memecah belah suatu bangsa. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa yang majemuk akan suku, agama, ras, dan adat istiadat perlu sebuah pedoman agar tidak sampai muncul suatu degradasi moral yaitu dengan Pancasila. Pancasila adalah suatu dasar negara dan ideologi negara yang didalamnya mengandung nilai-nilai kehidupan seperti nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, sosial, keadilan, moral dan etika, serta nilai persatuan yang digunakan sebagai upaya untuk membentuk suatu bangsa dan negara yang terbebas dari isu SARA dan *hoax*. Karena, hal itu dikhawatirkan akan membuat bangsa Indonesia yang sudah menjadi bangsa yang bersatu kita teguh bercerai kita runtuh malah menjadi terpecah belah. Untuk itu, kita sebagai warga negara yang peduli dan bangga dengan adanya Pancasila sebagai falsafah bangsa harus mampu mewujudkan tujuan bangsa yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila.

REFERENSI

- Cahyo, E. D. (2017). Pendidikan Karakter Guna Menanggulangi Dekadensi Moral Yang Terjadi Pada Siswa Sekolah Dasar. *Jurnalpendidikdasar*. Volume 9 nomor 1
- Damanhuri. (2016). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Upaya



- Pembangunan Karakter Bangsa
Jurnal Untirta Civic Education.
Vol. 1, No. 02
- Evelina, L.W. (2015). Analisis Isu S (suku)
A (agama) R (ras) A (antar
golongan) di Media sosial
Indonesia. *Jurnalmanagement*. Vol
7 no 1
- Faradila, A. H, Holilulloh, Adha, M.M.
(2014). Pengaruh Pemahaman
Ideologi Pancasila Terhadap Sikap
Moral Dalam Mengamalkan Nilai-
Nilai Pancasila.
Jurnal Kultur Demokrasi. Vol 2 no 7
- Fedyani, A. S. (2006). Membumikan
Multikulturalisme di
Indonesia. *Jurnal Antropologi
Sosial Budaya ETNOVISI*. Vol 2, No
1
- Ferdian, A. (2016). Harmonisasi
Pengaturan Tindak Pidana Khusus
Yang Objeknya Tulisan dan Berita
Yang Isinya Palsu. *Jurnal
Panorama Hukum*. Vol 1, No 1.
Diakses pada 5 Maret 2019
- Fuad, F. (2012). Islam dan Ideologi
Pancasila sebuah Dialektika. *Lex
jurnalica*. Volume 9 nomor 3
- Gregorian, M. (2018). Dampak Yuridis
Degradasi Nilai-Nilai Pancasila
Dalam Kehidupan Sosial di Era
Globalisasi. *LP2M-Undhira Bali*. 2
November
- Hari, K. S. (2017). Kebijakan Pemerintah
Menangkal Penyebaran Berita
Palsu atau Hoax. *Jurnal Muara
Ilmu Sosial Humaniora, dan
Seni*. Vol. 1, No. 01
- Hutabarat, B & Hans P. (2016). Tingkat
Toleransi Antar agama Di
Masyarakat Indonesia. *Jurnal
Societas dei*. Vol. 3, No. 1
- Juliswara, V. (2017). Mengembangkan
Model Literasi Media yang
Berkhebiakaan dalam
Menganalisis Informasi Hoax atau
Berita Palsu di Sosial Media.
Jurnal Pemikiran Sosiologi. Vol. 4
No. 02
- Latif, Y. (2011). *Negara Paripurna
Historisitas dan
Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gram
edia
- Lestari, G. (2015). Bhinneka Tunggal Ika:
Khasanah Multikultural Indonesia
di Tengah Kehidupan SARA.
*Jurnal Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan*. Vol 28 no 1
- Leuwol, T. (2018). Penerapan Sanksi
Pidana Terhadap Pelaku Cyber
Crime Yang Menyebarkan Isu
Suku, Ras, Agama Dan Antar
Golongan (SARA) Melalui Media
Sosial Ditinjau Dari Undang-
Undang ITE Nomor 19 Tahun
2016. *Jurnal Lex Crime*. Vol. 7, No. 2
- Levina, X. A. (2014). Analisis Framing
Terhadap Pemberitaan Sosok
Basuki Tjahaja Purnama (AHOK) di
Media Online. *Jurnal E-
Komunikasi*. Vol 2, No 1
- Lonto, A.L. (2015). Pengembangan Model
Pendidikan Karakter berbasis Nilai
Sosio-Kultural pada siswa SMA di
Minahasa. *Jurnal Mimbar*. Volume
31 nomor 2.
- Maftuh, B. (2008). Internalisasi Nilai-Nilai
Pancasila dan Nasionalisme
Melalui Pendidikan
Kewarganegaraan *Jurnal
educationist*. Volume 2 nomor 2
- Maryati, I & Nanang P. (2017). Integrasi
Nilai-Nilai Karakter Matematika



- Melalui Pembelajaran Konseptual. *Jurnal Mosharafa*. Vol 6, No 3
- Nurmalisa, Y & Adha, M, M. (2016). Peran Lembaga Sosial Terhadap Pembinaan Moral Remaja di Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol 1, No 1
- Oktavianti, R & Loisa, R. (2017). Penggunaan Media Sosial Sesuai Nilai Luhur Budaya Di Kalangan Siswa SMA. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol 3, No 1
- Prayitno, B. (2017). Langkah Pemerintah Menangkal Diseminasi Berita Palsu. *Jurnal Wacana Kinerja*. Vol 20, No 2
- Purwaningsih, E. (2010). Keluarga Dalam Mewujudkan Pendidikan Nilai Sebagai Upaya Mengatasi Degradasi Nilai Moral. *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora*. Vol 1, No 1
- Rachmah, H. (2013). Nilai-Nilai Dalam Pendidikan Karakter Bangsa Yang Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945. *E-jurnal WIDYA non-Eksakta*. Vol 1 no 1
- Rasywir, E & Purwarianti, A. (2015). Eksperimen Pada Sistem Klasifikasi Berita Hoax Berbahasa Indonesia Berbasis Pembelajaran Mesin. *Jurnal Cybermatika*. Vol 3, No 2
- Sentosa, B.A. (2017). Peran Media Massa Dalam Mencegah Konflik. *Jurnal Aspikom*. Vol.3, No.2
- Septanto, H. (2018). Pengaruh HOAX Dan Ujaran Kebencian Sebuah Cyber Crime Dengan Teknologi Sederhana Dikehidupan Sosial Masyarakat. *Jurnal Kalbiscentia*. Vol.5, No. 2
- Supriadi, M. (2015). Politisasi Agama di Ruang Publik: Komunikasi SARA dalam perdebatan Rational Choice Theory. *Jurnal Keamanan Nasional*. Vol. I, No.3
- Surur, M. (2010). Problematika Pendidikan Moral di Sekolah dan Upaya Pemecahannya. *Jurnal Fikroh*. Vol 4, No 1
- Toto, D.(2016). Penanaman Nilai dan Moral Pada Anak Sekolah Dasar Dengan Pendekatan *Stroytelling* Melalui Media Komunikasi Visual. *Jurnal Andhawpa*. Vol.02, No.01
- Wahyudi, A. (2006). Ideologi Pancasila: Doktrin yang Komprehen sifat aukonsepsi politis? *Jurnal Filsafat*. Volume 39 No 1
- Yudistira. (2016). Aktualisasi & Implementasi Dalam Menumbuh Kembangkan Karakter bangsa. *Jurnal Seminar Nasional Hukum*. Vol 2. No 1

